

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2572/2024
TGL. PEMBUATAN	02 Januari 2022
TGL. REVISI	12 September 2025 / 2
TGL. EFEKTIF	17 September 2025
DISAHKAN OLEH	Kemenyes EMMILYA ROSA, SKM, MKM NIP 197305251997032001
NAMA SOP	PENGANGKATAN PERTAMA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Permenpan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memahami dasar hukum dan ketentuan mengenai jabatan fungsional
- 2. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1. Komputer, printer, ATK dan koneksi Internet
- 2. Data Kepegawaian (SIMKA, Silk Arsip, dll)
- 3. Aplikasi SRIKANDI dan TNDE BKK Palembang

PERINGATAN

- 1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat proses pengangkatan pertama ke dalam jabfung
- 3. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
- 4. Monitoring dan evaluasi secara berkala

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
- Merupakan Turunan Proses Pengelolaan Sumber Daya Manusia dari Proses Bisnis Penyelenggaraan Administrasi, Manajemen, dan Dukungan Umum

SOP PENGANGKATAN PERTAMA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

				Pela	ksana				Mutu Bak	u	
No	Kegiatan		Kantor	Admii	ubbag nistrasi num Analis Kepegawalan			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima permohonan usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung dan memberikan disposisi kepada Kasubbag ADUM agar memproses surat usulan tersebut							Usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung	15 menit	Disposisi kepada Kasubbag ADUM	
2	Memberikan disposisi kepada analis kepegawaian untuk memproses usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung			Ļ			l	Disposisi dari Kepala Kantor dan usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung	15 menit	Disposisi kepada Analis Kepegawaian	
3	Memeriksa berkas usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung dan membuat surat usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung							Disposisi dari Kasubbag ADUM dan berkas usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung		Surat usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung	
4	Memeriksa dan memberikan paraf pada verbal surat permohonan usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung		Υ			T		Surat usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung	15 menit	Surat usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung yang telah diparaf	
5	Memeriksa dan menandatangani surat usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung		\bigvee	Т				Surat usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung	15 menit	Surat usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung yang telah ditandatangani	
6	Memberi nomor surat usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung		Y			—		Surat usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung	5 menit	Surat usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung yang telah diberi nomor	
7	Mengirimkan surat usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung ke Biro Kepegawaian melalui Setditjen P2P							Surat usulan pengangkatan pertama ke dalam jabfung	15 menit	Bukti pengiriman surat	
8	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan melaporkan ke Kepala Kantor							SOP Pengangkatan Pertama ke Dalam Jabatan Fungsional	60 menit	Bukti hasil monitoring dan evatuasi kegiatan	

Riwayat Perubahan

lo. Tanggal Perubahar	Revisi Ke-	Deskripsi Perubahan	Disetujui Oleh
1 02 Januari 2022	0	Pembuatan SOP	Kepala BKK Kelas I Palembang Emmilya Rosa, SKM, MKM
2 11 Juli 2024	1	 Perubahan kode penomoran SOP menjadi OT.02.02 Penambahan dasar hukum Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Penambahan 3 (tiga) keterangan pada Peringatan terkait : tolak gatifikasi pelayanan prima monitoring dan evaluasi 	Kepala BKK Kelas I Palembang Emmilya Rosa, SKM, MKM
12 September 2025	2	Perubahan nama direktorat menjadi Direktorat Penanggulangan Penyakit Perubahan peta proses bisnis penyelenggaraan karantina kesehatan Penambahan dasar hukum Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik	Kepala BKK Kelas I Palembang Emmilya Rosa, SKM, MKM